

## PENGARUH TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA OPD KOTA SURABAYA

Octavia Dwi Sagita Sari<sup>1</sup>, M. Taufiq Hidayat<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi Fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945

Surabaya

Email: [osagitasari@gmail.com](mailto:osagitasari@gmail.com)<sup>1</sup>, [taufikhidayat@gmail.com](mailto:taufikhidayat@gmail.com)<sup>2</sup>

### ABSTRACT

*This study aims to determine the effect of Transparency of Regional Financial Management and Internal Control System on Accountability of Government Agency Performance in Regional Apparatus Organization (OPD) of Surabaya City. This study uses quantitative methods. This study uses primary data by distributing 85 questionnaires to respondents in 17 Surabaya City Offices, but only 72 questionnaires were returned by respondents. The data analysis technique uses descriptive statistical analysis with SPSS test tools. The results of this study indicate that the variable Transparency of Regional Financial Management affects Accountability of Government Agency Performance and Internal Control System affects Accountability of Government Agency Performance. Transparency of Regional Financial Management and Internal Control System simultaneously affect Accountability of Government Agency Performance.*

**Keywords:** *Transparency of Regional Financial Management, Internal Control System, Accountability of Government Agency Performance.*

### PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dengan berbagai strategi. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan adanya akuntabilitas, instansi pemerintah dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan, keputusan, dan hasil kerja kepada publik, baik dari segi kebijakan, penggunaan anggaran, maupun hasil kinerja yang telah dicapai. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah menegaskan bahwa pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah masing-masing. Pemerintah daerah dibutuhkan untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dan memajukan layanan publik dengan upaya meningkatkan kinerja yang lebih baik. Kinerja pemerintah daerah dikatakan baik apabila pemerintah mampu mengelola pemerintahannya secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Sapulette, 2023). Keberhasilan kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui laporan keuangan yang mencerminkan tingkat pertanggungjawaban kepada publik.

Akuntabilitas kinerja mengacu pada tanggung jawab individu atau organisasi untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan, untuk melaporkan dan bertanggung jawab atas kinerja mereka kepada pihak yang berwenang atau pemangku kepentingan (Pratama, Agustin, & Taqwa, 2019). Akuntabilitas tidak hanya mencerminkan tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, namun juga menjadi indikator kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyampaikan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa setiap instansi pemerintah dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu, kejelasan dan penerapan akuntansi sektor publik, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, sistem pengukuran kinerja, ketaatan

pada peraturan perundang-undangan, sistem akuntansi pemerintah daerah, implementasi anggaran berbasis kinerja, pengendalian akuntansi, pelaporan dan akuntabilitas, efektivitas realisasi anggaran, pemahaman akuntansi, perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, evaluasi anggaran, realisasi anggaran, dan penilaian kinerja (Hidayat, 2023).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ialah suatu sistem yang dirancang untuk mengukur kinerja pemerintah dan berfungsi sebagai cara untuk menunjukkan kepada publik bahwa kepala daerah bertanggung jawab kepada masyarakat publik, serta menunjukkan seberapa efisien dan efektif pengelolaan keuangan yang digunakan dan kinerja yang dicapai oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) (Devi & Basyar, 2024). Berdasarkan laporan SAKIP 2023 Provinsi Jawa Timur, terdapat 8 kabupaten/kota yang mendapatkan predikat A termasuk Kota Surabaya. Meskipun demikian, berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 masih terdapat kelemahan pada evaluasi akuntabilitas kinerja internal, seperti evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilakukan secara optimal hingga level unit kerja. Hal ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih belum optimal sehingga berpotensi menurunkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian ini menggunakan variabel transparansi pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengendalian internal sebagai faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 mengatakan transparansi berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa pemerintah secara terbuka dan menyeluruh bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan dan mematuhi peraturan. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berlaku dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh bagi pihak yang membutuhkan (Sitepu, 2022). Hal tersebut membutuhkan sistem pengendalian internal yang kuat dalam menciptakan akuntabilitas kinerja yang lebih baik. Peneliti terdahulu yakni (Pangaribuan & Situmorang, 2024), (Putra & Indrasaraswati, 2021), (Manurung & Sembiring, 2024) dan (Alamsyah, Sjarlis, & Kitta, 2023) menyatakan bahwa Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Penelitian tersebut tidak sepakat dengan penelitian yang dilakukan oleh (Amali & Suwandi, 2021) dan (Binawati & Badriyah, 2022) yang mengatakan bahwa Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki pengaruh negatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Agensi**

Teori Agensi merupakan teori yang mendeskripsikan hubungan antara dua pihak, yaitu principal (pihak yang memberikan wewenang) dan agent (pihak yang menerima dan menjalankan wewenang) (Supriyono, 2018). Hubungan antara teori agensi dengan penelitian ini yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Surabaya bertindak sebagai (*agent*) yang harus membuat rencana untuk memberikan layanan terbaik untuk (*principal*) yaitu masyarakat. Dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat, maka pemerintah harus meningkatkan pelayanan kepada publik dengan prinsip kinerja pemerintah yang baik untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### **Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah**

Transparansi pengelolaan keuangan daerah berarti bahwa pemerintah daerah menunjukkan informasi tentang pengelolaan keuangan mereka sehingga masyarakat dan anggota dewan dapat mengawasi (Sitepu, 2022). Menurut (Krina, 2018) transparansi ialah prinsip yang menjamin bahwa masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan informasi

tentang penyelenggaraan pemerintahan, termasuk informasi dan prosedur yang digunakan untuk menerapkan kebijakan.

### **Sistem Pengendalian Internal**

Sistem pengendalian internal pada pemerintah daerah berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal merupakan sebuah proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi dan seluruh pegawai untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam konteks pemerintahan, sistem ini memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pengelolaan keuangan dan kegiatan pemerintah berjalan dengan baik, sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Sistem pengendalian internal pada pemerintah adalah suatu prosedur yang diterapkan untuk mengendalikan dan memonitor kegiatan pemerintahan agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien dan transparan (Supriyono, 2018).

### **Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

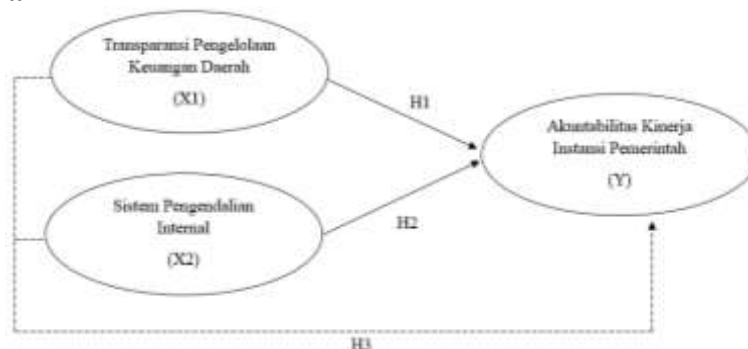
Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 akuntabilitas kinerja adalah kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan oleh para pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran keuangan mulai dari proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Parhusip & Karo, 2023). Hal ini mencakup penyampaian laporan yang jelas dan transparan mengenai pencapaian kinerja dan upaya untuk mencapai misi organisasi (Padang & Padang, 2023). Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mengacu pada tanggung jawab instansi untuk menyampaikan kepada publik mengenai sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja dan program pemerintah dapat tercapai (Siagian, 2019).

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi penelitian ini ialah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Surabaya dengan jumlah 17 instansi Dinas. Sampel penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria pegawai instansi seperti, kepala bagian keuangan, sekretaris, kepala bagian keuangan, dan pegawai keuangan. Sehingga sampel pada penelitian ini berjumlah 72 responden. Penelitian ini menggunakan data primer. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan kuesioner dengan memberikan serangkaian pernyataan yang akan dijawab oleh responden. Terdapat 5 poin skala likert yang bertujuan untuk mengukur persepsi responden dengan menyatakan setuju atau tidak setuju berdasarkan serangkaian pernyataan. Pernyataan tersebut mencakup aspek Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif dengan alat uji SPSS. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data kuesioner mengenai informasi responden, terdiri dari jenis kelamin, usia, jabatan, pendidikan terakhir dan lama bekerja. Uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Uji analisis regresi linear berganda dilakukan untuk menentukan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji hipotesis menggunakan uji F untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan uji t untuk mengetahui seberapa besar variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

## Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

———— = Secara Parsial  
 - - - - - = Secara Simultan

## Hipotesis

**H1** = Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada OPD Kota Surabaya.

**H2** = Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada OPD Kota Surabaya.

**H3** = Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada OPD Kota Surabaya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data ini diperoleh dari hasil pengisian kuesioner oleh responden di 17 Instansi Dinas di Kota Surabaya. Berikut adalah data responden yang akan digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 1. Deskripsi Responden

Karakteristik		Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	23	32%
	Perempuan	49	68%
	Total	72	100%
Usia	20-30 Tahun	13	18%
	31-40 Tahun	31	43%
	41-50 Tahun	20	28%
	> 50 Tahun	8	11%
	Total	72	100%
Jabatan	Kepala Dinas	1	1%
	Sekretaris	3	4%
	Kepala Bagian Keuangan	4	6%
	Pegawai Keuangan	64	89%
	Total	72	100%
Pendidikan Terakhir	SMA/Sederajat	-	-
	Diploma	2	3%
	S1	62	86%
	S2	5	7%
	S3	3	4%
	Total	72	100%

	Total	72	100%
Lama Bekerja	< 3 Tahun	-	-
	3-5 Tahun	14	19%
	5-10 Tahun	42	58%
	> 10 Tahun	16	22%
	Total	72	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Responden

Dapat diketahui dari Tabel 1. bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan dengan persentase 68%. Usia responden mayoritas berusia 31-40 tahun dengan persentase 43%. Responden sebagian besar menduduki jabatan pegawai keuangan dengan persentase 89%. Mayoritas responden memiliki jenjang pendidikan S1 dengan persentase 86%. Sebagian besar responden memiliki lama bekerja 5-10 tahun dengan persentase 58%.

### Hasil Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

**Tabel 2.** Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		72
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.84460699
Most Extreme Differences	Absolute	.096
	Positive	.096
	Negative	-.064
Test Statistic		.096
Asymp. Sig. (2-tailed)		.095 <sup>c</sup>

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS

Hasil uji normalitas data menggunakan *One-Sample Kolmogorov* pada Tabel 2. dapat diketahui bahwa hasil uji normalitas data menggunakan *One-Sample Kolmogorov Smirnov* menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,095 lebih besar dari 0,05. Hal tersebut telah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan, sehingga dapat membuktikan bahwa data sampel berdistribusi normal.

### Uji Multikolinearitas

**Tabel 3.** Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.284	3.032		.423	.673		
	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	.379	.102	.370	3.703	.000	.280	3.571
	Sistem Pengendalian Internal	.598	.106	.562	5.626	.000	.280	3.571

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS

Terkait dengan Tabel 3, diketahui hasil uji multikolinearitas memiliki nilai *tolerance* pada variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah dan variabel Sistem Pengendalian Internal sebesar  $0.280 > 0.10$ , sedangkan nilai VIF pada variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah dan variabel Sistem Pengendalian Internal VIF sebesar 3.571 yang artinya  $< 10$ . Sehingga, dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas.

#### Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 4.** Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.248	1.784		.700	.487
	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	-.002	.060	-.006	-.027	.979
	Sistem Pengendalian Internal	.006	.063	.022	.097	.923
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah						

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS

Berdasarkan Tabel 4, menunjukkan bahwa hasil uji heteroskedastisitas pada variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki nilai signifikan sebesar 0.979, sedangkan pada variabel Sistem Pengendalian Internal memiliki nilai signifikan sebesar 0.923. Sehingga dari masing-masing variabel memiliki nilai signifikan  $> 0.05$ , maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel tidak terjadi heteroskedastisitas.

## Uji Regresi Linear Berganda

**Tabel 5.** Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.284	3.032		.423	.673
	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	.379	.102	.370	3.703	0.000
	Sistem Pengendalian Internal	.598	.106	.562	5.626	0.000

a. Dependen Variabel: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS

Nilai konstansta (a) memiliki nilai sebesar 1.284. artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel independen yaitu Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (X1) dan Sistem Pengendalian Internal (X2) tidak mengalami perubahan, maka nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah 1.284.

Nilai koefisien regresi untuk variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu sebesar 0,379. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh positif yang artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen. Hal ini menunjukkan jika Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah mengalami kenaikan 1% maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah akan naik sebesar 0,379 dengan asumsi bahwa variabel lainnya dianggap konstan.

Nilai koefisien regresi untuk variabel Sistem Pengendalian Internal yaitu sebesar 0,598. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh positif yang artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen. Hal ini menunjukkan jika Sistem Pengendalian Internal mengalami kenaikan 1% maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah akan naik sebesar 0,598 dengan asumsi bahwa variabel lainnya dianggap konstan.

## Hasil Uji Hipotesis

### Uji t

**Tabel 6.** Hasil Uji t

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.284	3.032		.423	.673		

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	.379	.102	.370	3.703	.000	.280	3.571
	Sistem Pengendalian Internal	.598	.106	.562	5.626	.000	.280	3.571

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS

Berdasarkan Tabel 6. dapat diketahui hasil uji t pengaruh variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diperoleh t hitung sebesar 3.703. Menentukan t tabel menggunakan tabel distribusi statistik dengan signifikansi  $0,05/2 = 0,025$  menggunakan rumus  $df = n-k-1 = 72-2-1 = 67$  (k merupakan jumlah variabel independen). Sehingga diperoleh t tabel sebesar 1.996. Sehingga dapat diketahui bahwa t hitung (3.703) > t tabel (1.996) dan nilai signifikan  $0.000 < 0.05$ . Hasil uji t pengaruh variabel Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada diperoleh t hitung sebesar 5.626. Menentukan t tabel menggunakan tabel distribusi statistik dengan signifikansi  $0,05/2 = 0,025$  menggunakan rumus  $df = n-k-1 = 72-2-1 = 67$  (k merupakan jumlah variabel independen). Sehingga diperoleh t tabel sebesar 1.996. Sehingga dapat diketahui bahwa t hitung (5.626) > t tabel (1.996) dan nilai signifikan  $0.000 < 0.05$ .

## Uji F

**Tabel 7.** Hasil Uji F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.009.292	2	504.646	144.135	.000 <sup>b</sup>
	Residual	241.583	69	3.501		
	Total	1.250.875	71			

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS

Diketahui bahwa hasil uji F pada Tabel 7, diperoleh nilai F hitung sebesar 144.135. Menentukan F tabel menggunakan tabel distribusi statistik dengan signifikansi 0.05 menggunakan rumus  $df = n-k-1$  yaitu  $72-2-1 = 76$ , maka diperoleh F tabel sebesar 3.13. Sehingga dapat diketahui bahwa F hitung (144.134) > F tabel (3.13) dan nilai signifikan  $0.000$  yang artinya  $< 0.05$ .

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada uji t, dapat diketahui bahwa t hitung > t tabel dengan nilai  $3.703 > 1.996$  dan nilai signifikan  $0.000 < 0.05$ . Artinya H1 diterima yang menyatakan



bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada OPD Kota Surabaya. Pernyataan ini diperkuat oleh kenyataan bahwa laporan keuangan pemerintah Kota Surabaya dapat dicapai dengan mudah oleh masyarakat publik dan kebijakan publik sesuai dengan keterbukaan pengelolaan keuangan terhadap masyarakat. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh (Rahmadani & Narastri, 2023), (Alamsyah, Sjarlis, & Kitta, 2023), (Elkha & Wahidahwati, 2021), (Pangaribuan & Situmorang, 2024), (Putra & Indrasaraswati, 2021), dan (Khairi & Meiranto, 2021). Hasil penelitian ini dibuktikan dengan nilai yang diperoleh dari jawaban responden yang menjawab sangat setuju mengenai pernyataan transparansi pengelolaan keuangan daerah melalui kuesioner sebesar 58% sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan transparansi pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Surabaya sangat baik.

### **Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, hasil uji t, dapat diketahui bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan nilai  $5.626 > 1.996$  dan nilai signifikan  $0.000 < 0.05$  artinya  $H_2$  diterima yang menyatakan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Surabaya. Penelitian ini menjelaskan bahwa semakin tinggi pengendalian internal yang diterapkan oleh para pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Surabaya dapat membantu dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintah, hal tersebut dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kepada masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh (Doni, et al., 2023), (Padmadiani, Blongkod, & Wuryandini, 2023), (Widajaton & Kristiastuti, 2020) dan (Haryanto & Andayan, 2023). Hasil penelitian ini dibuktikan dengan para responden yang memberikan jawaban setuju pada pernyataan terkait sistem pengendalian internal pada kuesioner sebesar sangat 61%. Penelitian ini menjelaskan bahwa semakin tinggi pengendalian internal yang diterapkan oleh para pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Surabaya dapat membantu dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintah, hal tersebut dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kepada masyarakat.

### **Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, hasil uji F, dapat diketahui bahwa  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu dengan nilai  $144.134 > 3.13$  dan nilai signifikan  $0.000 < 0.05$  artinya  $H_3$  diterima yang menyatakan transparansi pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengendalian internal berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada OPD Kota Surabaya. Penelitian ini membuktikan adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang dapat diketahui dari uji koefisien determinasi ( $R^2$ ). Berdasarkan hasil uji nilai koefisien determinasi sebesar 0,807 atau 80,7%. Dengan demikian, secara bersama-sama variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah ( $X_1$ ) dan Sistem Pengendalian Internal ( $X_2$ ) memiliki pengaruh terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( $Y$ ) sebesar 80,7%, sementara sisanya sebesar 19,3% dapat dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengamati pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada OPD Kota Surabaya. Hasil penelitian didapatkan simpulan bahwa: a) Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Surabaya. b) Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Surabaya. c) Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh secara Simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Surabaya.

Saran untuk peneliti selanjutnya sebaiknya memperluas populasi penelitian selain pada OPD Kota Surabaya, selain itu juga menambahkan variabel lain seperti pelaksanaan anggaran, evaluasi anggaran dan efektivitas realisasi anggaran untuk melihat faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Sjarlis, S., & Kitta, S. (2023). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Pare-Pare. *Gendhera Buana Jurnal (GJB)*, 145--157.<https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/gbj/article/view/3521>.
- Amali, M. N., & Suwandi, E. D. (2021). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah (Studi pada SKPD Kabupaten Kebumen). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, 1125-1138.<https://doi.org/10.32639/jimmba.v3i6.959>.
- Binawati, E., & Badriyah, N. (2022). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten Magelang. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia Vol. 2 No. 1*, 32-49.<https://doi.org/10.32477/jrabi.v2i1.419>.
- Devi, S. M., & Basyar, M. R. (2024). Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Pada Instansi Pemerintah Daerah Kota Surabaya (Studi Kasus: RSUD Dr. Mohamad Soewandhie). *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 341-352.  
<https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i2.1208>.
- Doni, R. A., Sukrani, J., Defitri, S. Y., Yeni, A., Sriyanti, E., & Nurhayati. (2023). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Jurnal Manajemen, Bisnis dan Organisasi (JUMBO)*, Vol. 7 No. 2, 327-333.<https://doi.org/10.33772/jumbo.v7i2.529>.
- Elkha, W., & Wahidahwati. (2021). Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal dan Ilmu Riset*, 1-19.
- Haryanto, P., & Andayan, R. T. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pelaporan, Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Prosiding Seminal Nasional*, 70-85.
- Hidayat, M. T. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Literature Review. *ARMADA Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1336-1347.  
<https://doi.org/10.55681/armada.v1i11.1035>.
- Khairi, Y. D., & Meiranto, W. (2021). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1-9.
- Krina, L. L. (2018). *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Governance BPPN.
- Manurung, S., & Sembiring, S. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Periode 2017-2021. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 50-62,  
<https://doi.org/10.54367/jrak.v10i1.3522>.

- Padang, N. N., & Padang, W. S. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* , 303-318, <https://doi.org/10.54367/jrak.v9i2.2985>.
- Padmadiani, R., Blongkod, H., & Wuryandini, A. R. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo). *COSTING: Journal of Economic Bussines and Accounting*, Vol. 7 No. 1, 240-251. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.5906>.
- Pangaribuan, J., & Situmorang, H. (2024). Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Batam. *Jurnal riset Akuntansi Keuangan*, 1-19. <https://doi.org/10.54367/jrak.v10i1.3519>.
- Parhusip, P. T., & Karo, E. B. (2023). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 319-334, <https://doi.org/10.54367/jrak.v9i2.2986>.
- Pratama, R., Agustin, H., & Taqwa, S. (2019). Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 429-444. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i1.85>.
- Putra, I., & Indrasaraswati, S. (2021). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung (Survei pada OPD Kabupaten Klungkung). *Widya Akuntansi dan Keuangan*, 79-92.
- Rahmadani, D. T., & Narastri, M. (2023). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Surabaya. *Akuntansi: Jurnal Riset Ilmu Akuntansi Vol. 2, No. 4*, 361-375. <https://doi.org/10.55606/akuntansi.v2i4.1489>.
- Sapulette, S. G. (2023). *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Siagian, S. P. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sitepu, A. P. (2022). *Transparansi Pengelolaan keuangan Daerah*. Sumatera Barat: CV Aska Pustaka.
- Supriyono, R. A. (2018). *Akuntansi Keprilakuan*. Yogyakarta: Gadjah Mada.
- Widajatun, V. W., & Kristiastuti. (2020). The Effect of Regional Financial Supervision, Accountability and Transparency of Regional Financial Management on Local Government Performance. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal*, Vol 3 No 4, 2966-2974. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i4.1319>.